



Sinergitas Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Inklusif Wisata The Adventure Land Romokalisari Kota Surabaya

Gerry Wahyu Berlia¹, Anggraeny Puspaningtyas², Eddy Wahyudi³

¹²³ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

gerrywahyuberlia@gmail.com

anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

ediwahyudi@untag-sby.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pembangunan wisata edukatif dan inklusif di kawasan The Adventure Land Romokalisari, Kota Surabaya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap instansi pemerintah, masyarakat, serta komunitas lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lima aspek utama dalam sinergitas pembangunan, yakni struktur organisasi, potensi sumber daya, pola komunikasi, sikap pelaku kebijakan, dan kesamaan persepsi, telah berjalan dengan cukup efektif. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan dalam aspek teknis dan kelembagaan. Implikasi dari hasil ini menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pembangunan wisata berkelanjutan.

Kata Kunci: sinergitas, wisata inklusif, stakeholder, pemberdayaan masyarakat, The Adventure Land Romokalisari

ABSTRACT

This study analyzes the synergy among stakeholders in the development of educational and inclusive tourism in The Adventure Land Romokalisari area, Surabaya City. The research employs a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation involving government agencies, local communities, and community groups. The findings indicate that five key aspects of stakeholder synergy organizational structure, resource potential, communication patterns, policy actor attitudes, and shared perceptions have been functioning relatively effectively. However, several obstacles remain, particularly in technical and institutional aspects. The implications of these findings highlight the importance of strengthening cross-sectoral coordination and ensuring active community participation, especially from vulnerable groups, in the pursuit of sustainable tourism development.

Keywords: synergy, inclusive tourism, stakeholders, community empowerment, The Adventure Land Romokalisari

1. PENDAHULUAN

Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah, tidak hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan

*Corresponding author

E-mail addresses: gerrywahyuberliawork@gmail.com

berkelanjutan, muncul pendekatan *pariwisata inklusif* yang menekankan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penyandang disabilitas, serta komunitas lokal yang kerap terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini mendorong transformasi peran masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan. Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, menunjukkan komitmen terhadap pengembangan kawasan wisata yang berbasis ekologi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu inisiatif nyata diwujudkan melalui pembangunan kawasan wisata edukatif *The Adventure Land Romokalisari* yang diprakarsai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya. Kawasan ini dibangun di wilayah pesisir dengan memadukan fungsi wisata air, edukasi perikanan, pelestarian mangrove, dan pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya warga Rusun dan sekitarnya.



Grafik 1. 1 Data Pengunjung Wisata Romokalisari 2021-2024

Sumber: Olahan Penulis

Romokalisari Adventure Land telah mengalami peningkatan kunjungan yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2023. Pada tahun 2022, jumlah pengunjung tercatat sekitar 30.484 orang, yang menunjukkan dampak pemulihan pasca-pandemi COVID-19, meskipun masih dalam batasan yang diberlakukan. Memasuki tahun 2023, kunjungan meningkat menjadi sekitar 93.141 orang, seiring dengan kembali maraknya kegiatan luar ruangan dan minat masyarakat untuk berwisata. Pada tahun 2024, Romokalisari mencatat sekitar 33.206 pengunjung, Jumlah pengunjung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Data terbaru dari Januari hingga Mei 2025 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung mencapai 48.198 orang, dengan rata-rata sekitar 9.500 pengunjung per bulan. Secara keseluruhan, Romokalisari Adventure Land terus berkembang sebagai salah satu destinasi wisata menarik di Surabaya, dengan kunjungan yang konsisten meningkat setiap tahunnya berkat kampanye promosi yang aktif dan daya tarik alamnya yang menawan.

Angka ini menunjukkan minat masyarakat dan wisatawan terhadap destinasi alam di kawasan tersebut. Untuk lebih mendalami data ini, kita bisa melihat informasi dari Pemerintah Kota Surabaya yang mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung di Romokalisari Adventure Land, salah satu atraksi yang populer, mulai dari bulan Januari hingga Juni 2024 telah mencapai 21.446 orang. Jika kita analisis lebih lanjut, rata-rata pengunjung per bulan di tempat ini adalah sekitar 3.500 orang, yang mencerminkan ketertarikan yang stabil terhadap aktivitas wisata di kawasan ini. Data ini penting untuk

memahami tren wisata di Surabaya Barat dan memberikan gambaran mengenai potensi pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya pengunjung, pihak pengelola atraksi dapat memanfaatkan informasi ini untuk meningkatkan fasilitas, promosi, serta kegiatan yang menarik agar lebih banyak wisatawan berkunjung di masa mendatang.

Pembangunan kawasan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari OPD teknis seperti DKPP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemerintah kelurahan, hingga organisasi masyarakat seperti Paguyuban MBR. Sinergitas antar aktor ini menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan wisata yang tidak hanya menarik secara fisik, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara lingkungan. Namun, pada praktiknya, kolaborasi antar pihak seringkali dihadapkan pada tantangan koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta ketimpangan dalam distribusi peran dan wewenang. Penelitian ini hadir untuk mengevaluasi dan menganalisis bagaimana sinergitas antarpemangku kepentingan terbentuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kawasan wisata The Adventure Land Romokalisari. Fokus kajian diarahkan pada lima aspek utama berdasarkan teori sinergi pembangunan daerah yang dikemukakan oleh Iwan Satibi (2023), yakni struktur organisasi, potensi sumber daya, pola komunikasi, sikap pelaku kebijakan, dan kesamaan persepsi. Kelima aspek ini diyakini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kolaborasi dalam pembangunan berbasis masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pariwisata Inklusif

Pariwisata inklusif merupakan konsep yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan anak-anak, dalam seluruh proses pembangunan pariwisata. Menurut Higgins-Desbiolles (2006), pariwisata tidak hanya harus berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, inklusivitas berarti menyediakan akses, kesempatan, dan peran yang setara dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan kegiatan wisata.

Sinergitas Pemangku Kepentingan

Sinergitas adalah proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak dengan tujuan dan kepentingan berbeda dalam satu kesatuan aksi pembangunan. Menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006), sinergitas yang efektif membutuhkan kejelasan peran, kesamaan visi, komunikasi terbuka, serta koordinasi kelembagaan yang berkesinambungan. Dalam pembangunan pariwisata, sinergi menjadi penting untuk mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, swasta, dan komunitas lokal. Kerja sama yang terbentuk dari bawah ke atas (bottom-up) maupun dari atas ke bawah (top-down) menjadi penentu keberhasilan dalam pembangunan kawasan berbasis masyarakat.

*Corresponding author

E-mail addresses: gerrywahyuberliawork@gmail.com

Teori Sinergi Iwan Satibi (2023)

Teori sinergi pembangunan daerah oleh Iwan Satibi (2023) menyajikan lima indikator utama dalam menilai kualitas sinergitas lintas pemangku kepentingan, yaitu: (1) struktur organisasi yang adaptif dan saling melengkapi, (2) potensi sumber daya yang disinergikan, (3) pola komunikasi yang partisipatif dan produktif, (4) sikap pelaku kebijakan yang terbuka terhadap kolaborasi, dan (5) kesamaan persepsi terhadap tujuan pembangunan. Teori ini relevan dalam menganalisis praktik kolaboratif antar instansi pemerintah, masyarakat, dan komunitas dalam konteks pembangunan daerah, termasuk pembangunan wisata berbasis inklusivitas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam bentuk dan dinamika sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pembangunan wisata edukatif dan inklusif di kawasan *The Adventure Land Romokalisari*, Kota Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dan proses interaksi antarlembaga secara kontekstual, terutama dalam kaitannya dengan kolaborasi lintas sektor. Lokasi penelitian berfokus pada kawasan wisata Romokalisari yang berada di bawah koordinasi Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, yang merupakan lokasi strategis dengan latar sosial masyarakat berpenghasilan rendah dan aktivitas wisata berbasis perairan serta edukasi perikanan.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta peran langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan wisata. Informan kunci terdiri dari perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), aparaturn Kelurahan Romokalisari, pengurus Paguyuban Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta warga yang terlibat dalam operasional wisata seperti penjaga wahana, pelaku UMKM, dan penyuluh lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif terhadap kegiatan wisata dan forum komunikasi, serta studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan dan laporan kegiatan yang relevan, seperti RPJMD, Renstra DKPP, dan RKPd.

Proses analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara tematik berdasarkan lima aspek utama sinergitas menurut teori Iwan Satibi (2023), yakni struktur organisasi, potensi sumber daya, pola komunikasi, sikap pelaku kebijakan, dan kesamaan persepsi. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola kolaborasi, efektivitas koordinasi, serta hambatan dalam implementasi program wisata inklusif. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melakukan konfirmasi ulang kepada informan melalui teknik *member check*.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana sinergi lintas sektor dapat terbentuk, berjalan, dan memengaruhi keberhasilan program pembangunan wisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan pengungkapan aspek-aspek kelembagaan dan sosial yang sering kali tidak tercakup dalam pendekatan kuantitatif, sehingga hasilnya dapat

digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan pembangunan wisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa pembangunan kawasan wisata edukatif dan inklusif *The Adventure Land Romokalisari* melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Aktor-aktor kunci yang berperan dalam pembangunan kawasan ini mencakup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kelurahan Romokalisari, serta Paguyuban Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sebagian besar terdiri dari warga Rusun dan masyarakat sekitar. Sinergi antar pemangku kepentingan tampak dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengelolaan operasional harian wisata. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target infrastruktur dan promosi wisata, tetapi juga mengusung misi pemberdayaan dan partisipasi sosial secara berkelanjutan.

Dari aspek **struktur organisasi**, hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab yang saling mendukung. DKPP berperan sebagai inisiator utama pembangunan kawasan wisata dengan membentuk tim lintas bidang yang fleksibel dan bersifat fungsional. Tim ini terdiri dari bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan yang menangani edukasi budidaya ikan dan pelatihan masyarakat. DLH hadir sebagai institusi pendukung konservasi lingkungan dengan tanggung jawab dalam pengawasan kualitas air, pemeliharaan vegetasi, dan edukasi ekosistem mangrove. Kelurahan Romokalisari menjalankan fungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat lokal, memfasilitasi komunikasi, pendataan, serta pelibatan warga dalam program-program lintas sektor. Sementara itu, Paguyuban MBR menjalankan fungsi sebagai pelaksana kegiatan teknis lapangan seperti pengelolaan wahana wisata, penjagaan lokasi, pengelolaan kebersihan, dan unit-unit UMKM yang menjual produk lokal.

Dalam aspek **potensi sumber daya**, masing-masing aktor membawa kontribusi yang khas dan saling melengkapi. DKPP memiliki tenaga penyuluh, infrastruktur kolam edukatif, serta program-program pelatihan yang disalurkan kepada kelompok MBR. DLH menyediakan tanaman hijau, hewan konservasi, serta alat pemantau kualitas air yang mendukung keberlanjutan ekowisata. Kelurahan menyediakan akses terhadap data kependudukan, tokoh masyarakat, dan forum sosial RT/RW yang dapat dijadikan medium pemberdayaan. Paguyuban MBR menyediakan tenaga kerja lokal yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki keterampilan teknis dalam mengelola unit-unit wisata seperti perahu, loket, kuliner, dan lapak ikan segar. Meskipun belum seluruh potensi ini dilembagakan ke dalam sistem formal, implementasinya telah berjalan secara fungsional dan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat lokal.

*Corresponding author

E-mail addresses: gerrywahyuberliawork@gmail.com

Dalam aspek **pola komunikasi**, ditemukan model komunikasi yang bersifat kombinatif. Komunikasi formal berlangsung melalui forum lintas OPD, rapat koordinasi kelurahan, dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang memungkinkan adanya penyaluran aspirasi warga. Di sisi lain, komunikasi informal juga sangat dominan dan efektif, seperti pemanfaatan grup WhatsApp antarinstansi, koordinasi langsung antar petugas lapangan, dan pendekatan kultural oleh tokoh lokal serta penyuluh. Komunikasi ini tidak hanya mempercepat respons teknis di lapangan, tetapi juga memperkuat relasi sosial antarpihak, memperluas partisipasi warga, dan meningkatkan keterhubungan antarprogram.

Dari sisi **sikap pelaku kebijakan**, penelitian ini menemukan adanya komitmen dan keterbukaan yang tinggi terhadap kolaborasi. DKPP menunjukkan sikap progresif dengan menempatkan sektor wisata sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan edukasi masyarakat. DLH juga bersedia berperan meskipun tidak memiliki mandat utama dalam pengelolaan pariwisata, dengan tetap menjalankan fungsi pelestarian lingkungan secara aktif. Kelurahan sebagai lembaga paling dekat dengan masyarakat menunjukkan sikap fasilitatif dan adaptif dalam merespons kebutuhan warga dan menjembatani komunikasi antar lembaga. Paguyuban MBR sebagai representasi warga menunjukkan sikap partisipatif, antusias, dan siap bekerjasama, baik dalam pelaksanaan kegiatan wisata maupun dalam pengambilan keputusan pada tingkat komunitas. Sikap-sikap ini mencerminkan adanya *collective leadership*, yaitu kemauan untuk berbagi peran dan membangun kepemimpinan lintas sektor.

Aspek terakhir yaitu **kesamaan persepsi**, menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan memiliki tujuan yang relatif seragam, yaitu menjadikan *The Adventure Land Romokalisari* sebagai kawasan wisata edukatif yang inklusif, produktif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Kesamaan pandangan ini tampak dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD Kota Surabaya, Renstra DKPP, serta forum musyawarah warga. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, salah satunya adalah belum tersedianya fasilitas aksesibilitas bagi kelompok difabel seperti jalur kursi roda, papan informasi braille, atau pemandu khusus. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap prinsip inklusivitas belum sepenuhnya terwujud dalam praktik lapangan, dan masih memerlukan perhatian serius dari pihak-pihak terkait.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan kawasan *The Adventure Land Romokalisari* telah berjalan dalam kerangka sinergitas antarpemangku kepentingan yang cukup efektif. Setiap aktor memainkan perannya sesuai kapasitas dan fungsi masing-masing, dan telah terbentuk sistem kerja kolaboratif yang memperlihatkan integrasi struktural, sosial, dan teknis. Temuan ini menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut mengenai efektivitas model sinergitas yang diterapkan, serta tantangan-tantangan yang masih perlu diatasi untuk mencapai keberlanjutan pembangunan wisata yang benar-benar inklusif dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa sinergitas dalam pembangunan kawasan wisata *The Adventure Land Romokalisari* telah mengarah pada praktik kolaboratif yang cukup solid, terutama bila ditinjau melalui lima indikator utama menurut teori Iwan Satibi (2023). Pertama, dari aspek **struktur organisasi**, konfigurasi peran antara DKPP, DLH, Kelurahan Romokalisari, dan Paguyuban MBR menunjukkan pola

kerja yang saling melengkapi. DKPP bertindak sebagai inisiator dan pengarah teknis, DLH memastikan keberlanjutan lingkungan, Kelurahan memfasilitasi birokrasi dan penguatan sosial, sedangkan Paguyuban MBR menjadi ujung tombak operasional wisata. Hal ini mencerminkan apa yang disebut Satibi sebagai *struktur adaptif* dan *multi-level governance*, yaitu kolaborasi antara institusi formal dan struktur sosial berbasis komunitas.

Kedua, dari aspek **potensi sumber daya**, terlihat bahwa berbagai sumber daya—baik fisik, manusia, sosial, maupun ekologis—telah dimanfaatkan secara relatif optimal meskipun belum terintegrasi dalam kelembagaan formal. DKPP menyediakan penyuluh dan kolam edukasi; DLH memberi kontribusi berupa tanaman dan alat uji lingkungan; Kelurahan menghubungkan dengan data dan forum sosial; sedangkan MBR berkontribusi melalui tenaga kerja dan keterampilan hasil pelatihan. Dalam teori Satibi, ini disebut sebagai *sinergi sumber daya tersebar*, di mana masing-masing pihak membawa kekuatan unik yang bila dikoordinasikan secara efektif dapat menghasilkan dampak berkelanjutan.

Ketiga, dalam aspek **pola komunikasi**, penerapan kombinasi antara saluran formal dan informal membuktikan keefektifan komunikasi dua arah dalam proses pembangunan. Rapat resmi lintas OPD, forum musrenbang, serta komunikasi harian melalui WhatsApp dan kunjungan lapangan merupakan bentuk nyata dari *komunikasi sosial produktif* sebagaimana dijelaskan Satibi, yang menekankan pentingnya keterhubungan antaraktor melalui media yang fleksibel, informal, dan adaptif terhadap konteks lokal.

Keempat, pada **sikap pelaku kebijakan**, ditemukan adanya keterbukaan, partisipasi, dan kolaborasi yang cukup kuat. DKPP dan DLH menunjukkan kesediaan untuk keluar dari batas sektoral tradisional demi mendukung program berbasis pemberdayaan dan ekowisata. Kelurahan aktif menjembatani dan mendampingi masyarakat, sementara Paguyuban MBR menunjukkan semangat gotong royong dan kepemilikan terhadap program. Kondisi ini menggambarkan prinsip *kepemimpinan kolektif* atau *collective leadership*, di mana tidak ada dominasi tunggal, melainkan koordinasi lintas peran yang demokratis.

Kelima, dari aspek **kesamaan persepsi**, telah terjadi penyelarasan visi di antara pemangku kepentingan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Renstra, serta pertemuan-pertemuan perencanaan di tingkat lokal. Mereka memiliki pemahaman bersama tentang tujuan kawasan wisata yang edukatif, inklusif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan, implementasi teknis masih belum sepenuhnya mencerminkan idealisme tersebut, terutama dalam aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ini menunjukkan adanya *celah antara visi dan praktik*, yang menurut Satibi merupakan risiko laten dari sinergi yang tidak disertai dengan pengawasan dan evaluasi berbasis indikator inklusif.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa bentuk sinergitas yang diterapkan dalam pembangunan kawasan wisata ini telah memenuhi sebagian besar unsur teori Satibi. Struktur kolaboratif yang terbentuk sudah berjalan secara fungsional, dan sinergi sumber daya menunjukkan kecenderungan positif. Namun, tantangan masih ditemukan dalam hal pelembagaan peran dan penyempurnaan inklusivitas, terutama bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, pembentukan

*Corresponding author

E-mail addresses: gerrywahyuberliawork@gmail.com

unit pengelola lintas sektor, serta sistem evaluasi periodik untuk menjaga keberlanjutan dan konsistensi kebijakan wisata inklusif ke depan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan kawasan wisata edukatif dan inklusif *The Adventure Land Romokalisari* menunjukkan adanya sinergitas yang cukup efektif antara DKPP, DLH, Kelurahan Romokalisari, dan Paguyuban MBR dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan kawasan. Kolaborasi ini tercermin dari struktur organisasi yang adaptif, pemanfaatan sumber daya yang saling melengkapi, komunikasi dua arah yang produktif, sikap kebijakan yang terbuka, serta kesamaan persepsi mengenai tujuan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala dalam kelembagaan teknis dan kurangnya fasilitas aksesibilitas bagi kelompok difabel. Oleh karena itu, disarankan agar DKPP membentuk unit pengelola wisata secara permanen, DLH memperkuat edukasi lingkungan, Kelurahan meningkatkan pelibatan kelompok rentan, dan Paguyuban MBR memperkuat kapasitas koordinatif internal. Pemerintah Kota Surabaya juga perlu merumuskan kebijakan jangka panjang tentang wisata inklusif berbasis masyarakat dalam RPJMD, serta mendorong pembentukan sistem evaluasi bersama guna memastikan keberlanjutan dan keadilan pembangunan wisata di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ayu, S.-A., Tresyanto, C.-A., & Susila, P.-S. (n.d.). *Strategi Pemasaran 7P Pada Penciptaan Kepuasan Pengunjung Wisata Romokalisari Surabaya*.

Bentri, S. A., Putra, K. A., Brenda, M., Noelia, D. N., Senjaya, L. J., & Valentino, P.E. (n.d.). *Perancangan Brand Identity Kawasan Wisata Romokalisari Adventure Land di Surabaya*.

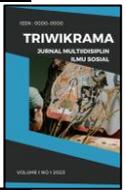
Berlian, G., Kumala, W. N., Raharjo, A. N., Musleh, M., Lubis, L., & Publik, A. (2024). *Model Kolaborasi Stakeholders dalam Pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Berbasis Pentahelix*. 10(2). <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15366>

Destiana, R., & Yuningsih, T. (n.d.). *Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau*. www.kemenpar.go.id,

Marwan, M., & Isnaeni, N. (2022). Bringing Environmental State Back In: Menakar Sentralitas Peran Pemerintah dalam Kemitraan Multipihak untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Wakatobi). *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 123. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.7>

Nurhidayah, K., & Widiyanto, H. W. (n.d.). *ANALISIS STAKEHOLDER PENTAHHELIX DALAM PENGEMBANGAN WISATA PUNCAK SOSOK DI DESA BAWURAN, PLERET, BANTUL*. *PENTAHHELIX STAKEHOLDERS ANALYSIS IN THE DEVELOPMENT OF PUNCAK SOSOK TOURISM IN BAWURAN VILLAGE, PLERET, BANTUL*.

Pengembangan, S., Wisata, K., Berdasarkan, B., Pengunjung, K., Al Baqibillah, M., Studi, P., Wilayah, P., & Kota, D. (2024). *Studi Kasus: The Adventure Land Romokalisari Surabaya*.



Reindrawati, D. Y. (2023). Challenges of community participation in tourism planning in developing countries. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2164240>

Sanjaya, N., & Fadhhly, Z. (2024). Kolaborasi Pemerintahan Gampong Dengan Pemuda dalam Memanfaatkan Bendungan Irigasi Sebagai Objek Wisata Lokal Gampong Meunasah Krueng. In *Journal of Comprehensive Science p-ISSN* (Vol. 3, Issue 5).